

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBENTUKAN PREFERENSI POLITIK AWAL PEMILIH PEMULA

Sukri Tamma

Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Email: sukripolitik@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam mempengaruhi pembentukan preferensi politik awal pemilih pemula. Preferensi politik merupakan salah satu aspek penting bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam sistem demokrasi. Berdasarkan preferensi politik tertentu seseorang akan memiliki alasan dan landasan bagi perilaku maupun pilihan-pilihan politiknya, termasuk pemilih pemula. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek pembentukannya menjadi penting untuk memahami bagaimana pemahaman awal mereka sebelum terlibat secara langsung dalam ruang politik seperti pemilu. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2020 terhadap pemilih pemula yang merupakan siswa Sekolah Menengah Atas, ditemukan bahwa pembentukan preferensi politik awal mereka tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi orang tua seperti yang selama ini diyakini. Mereka mendapatkan informasi terkait pandangan awal terhadap politik melalui materi pendidikan kewarganegaraan. Materi-materi terkait dengan standar dan nilai dalam berperilaku sebagai warga negara di antara warga negara lainnya telah memberikan mereka pemahaman awal tentang pentingnya meletakkan diri secara baik dalam konteks kehidupan termasuk dalam ruang politik. Hal ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan menjadi ruang sosialisasi sekaligus pendidikan politik bagi pemilih pemula. Pemahaman tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pengembangan pemahaman mereka tentang politik dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku sebagai seorang warga negara yang baik dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci:

Pemilih Pemula, Pendidikan Kewarganegaraan, Preferensi Politik, Partisipasi, Sistem Demokrasi

Abstract

This paper aims to show the important role of civic education in influencing the early political preferences of novice voters. Political preference is one of the important aspects for someone to be able to participate properly in a democratic system. Based on certain political preferences, a person will have reasons and foundations for his behavior and political choices, including novice voters. Therefore, an understanding of the aspects of its formation becomes an important aspect to be understood before being directly involved in political elections. Based on qualitative research conducted in Makassar City in 2020 on novice voters who are high school students, it was found that the formation of their initial political preferences was not only influenced by parental

preferences but also through civic education courses at schools. The course which consists of standards and social values in behaving as citizens has given them an initial understanding of the importance of placing themselves well in the political space. This makes civic education space for socialization as well as political education for novice voters. This understanding then becomes the basis for developing their understanding of politics and how they should behave as good citizens in a democratic system.

Keywords:

Beginner Voters, Civic Education, Political Preferences, Participation, Democratic Systems

Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakat di Indonesia senantiasa diharapkan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik sebagai wujud dari konsepsi tentang *Demos* dan *Kratos* (Pemerintahan oleh Rakyat). Dengan demikian, baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam ruang politik menjadi aspek penting atas klaim demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan pemaknaan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka sudah dapat dipastikan bahwa salah satu fondasi penting dari penerapan sistem demokrasi adalah partisipasi rakyat.¹ Dengan demikian setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem ini.

Sebagai salah satu segmen dalam masyarakat, maka pemilih pemula juga berada dalam pemaknaan partisipasi masyarakat. Hal ini berarti bahwa partisipasi pemilih pemula yang merupakan segmen masyarakat berusia muda juga menjadi bagian penting dalam menjamin pelaksanaan sistem demokrasi yang lebih substansial.² Hal tersebut sangat penting untuk diwujudkan mengingat konstitusi Republik Indonesia mengamankan tentang pentingnya kedaulatan rakyat untuk dilaksanakan dengan baik menuju cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini kedaulatan rakyat melingkupi seluruh rakyat Indonesia, di mana segmen pemilih pemula juga menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu setiap ruang politik yang memungkinkan adanya partisipasi rakyat maka kehadiran setiap segmen masyarakat di dalamnya sangat

¹Peter Biegelbauer & Janus Hansen, "Democratic Theory and Citizen Participation: Democracy Models in the Evaluation of Public Participation in Science and Technology" dalam *Science and Public Policy*, Vol. 38, No. 8 (2011), h. 591.

²RR Emilia Yustiningrum & Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014" dalam *Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2015), h. 118.

penting tidak saja sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan rakyat. Lebih dari itu, hal tersebut juga sekaligus sebagai upaya untuk menjamin adanya legitimasi yang kuat atas sistem politik yang berlaku termasuk setiap kegiatan yang terkait dengannya, seperti pemilu.

Sebagai salah satu kegiatan penting dalam sistem demokrasi, maka pemilu sudah seharusnya menjadi ruang keterlibatan setiap segmen dalam masyarakat yang dimungkinkan oleh hukum tanpa kecuali termasuk segmen pemilih pemula. Dalam pemahaman ini pemilih pemula merupakan segmen masyarakat yang sama dengan segmen masyarakat lain misalnya para orang tua. Secara konstitusional, tidak ada perbedaan atas hak dalam berpartisipasi dari para pemilih pemula yang umumnya merupakan kalangan muda dengan mereka yang merupakan golongan rakyat dewasa. Semuanya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang politik. Dengan demikian kalangan pemilih pemula diasumsikan sebagai segmen yang telah memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dengan kalangan dewasa dalam berpartisipasi. Namun hal ini nampaknya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemilih pemula. Sejak awal berdasarkan *terminology* yang ada, pemilih pemula merupakan segmen masyarakat yang pada dasarnya dianggap belum memiliki pengalaman yang baik dalam keterlibatan pada pemilu seperti segmen dewasa.³ Hal ini erat kaitannya dengan kata “pemula” yang dilekatkan pada kelompok masyarakat ini. Pada dasarnya ada beberapa makna yang terkait dengan kata tersebut . namun secara umum tulisan ini menggunakan pemahaman yang diartikan sebagai “pertama kali memiliki hak memilih karena telah mencukupi usianya sesuai ketentuan”.⁴ Karena itu kemudian Analisa terhadap segmen ini menjadi penting karena secara formal mereka telah dianggap memiliki hak yang sama dengan kalangan dewasa, namun pada konteks pengetahuan, mereka cenderung belum memiliki pengalaman empirik terlibat secara langsung di dalamnya.

Sebagai bagian dari masyarakat yang baru akan menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula seringkali dipandang sebagai segmen masyarakat yang secara politik rentan terhadap berbagai pengaruh yang akan mengganggu kemandirian mereka dalam

³Özlem Becerik Yoldaş, “Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People” dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 174 (2015), h. 544.

⁴Niels Nørgaard Kristenseng & Trond Solhaug, “Students as First-time Voters: The Role of Voter Advice Applications in Self-reflection on Party Choice and Political Identity” dalam *Journal of Social Science Education*, Vol. 15, No. 3 (2016), h. 32.

menentukan perilaku politiknya termasuk dalam memilih dalam pemilu. Kondisi tersebut menjadikan mereka dianggap sebagai segmen pemilih yang masih kurang mandiri dan labil dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Hal tersebut terutama dikaitkan dengan kenyataan bahwa mereka baru pertama kali memenuhi syarat formal sebagai pemilih sehingga belum mempunyai preferensi yang cukup untuk bertindak sebagai pemilih yang mandiri dalam pemilihan umum. Segmen ini bahkan tidak jarang dipandang sebagai komunitas dalam masyarakat yang terputus dari politik⁵. Tidak sedikit penelitian yang telah dilakukan terhadap segmen ini di banyak negara menunjukkan bahwa para pemilih pemula yang merupakan kaum muda cenderung kurang berminat pada politik dan karena itu mereka dianggap kurang siap untuk berpartisipasi secara langsung dalam lapangan politik termasuk dalam pemilu seperti segmen pemilih dewasa.⁶ Selain itu, pemilih pemula juga sering diasumsikan sebagai segmen pemilih yang membutuhkan strategi pendekatan khusus dalam memahami kecenderungan perilaku politiknya.⁷ Hal ini nampaknya sangat terkait dengan asumsi bahwa mereka tidak memiliki sumber referensi yang cukup komprehensif dalam membentuk perilaku politiknya sehingga perilaku politiknya akan cenderung sangat cair.

Pemahaman tersebut menjadikan pemilih pemula cenderung dianggap hanya merepresentasikan kecenderungan pengetahuan dan preferensi politik orang-orang terdekatnya, dalam hal ini orang tuanya. Kondisi ini menjadikan segmen pemilih pemula dianggap sebagai kelompok pemilih yang mudah ditebak arah perilaku dan pilihan politiknya. Hal tersebut secara kuat diletakkan pada keyakinan bahwa orang tua menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi preferensi politiknya.⁸ Bahkan orang tua dianggap sebagai faktor paling dominan dalam menentukan kecenderungan perilaku politik pemilih pemula. Hal ini menjadikan segmen ini seolah menjadi bagian dalam masyarakat yang perilaku politiknya sangat ditentukan oleh orang tua sehingga kurang mandiri karena preferensi politiknya sejak awal dipengaruhi oleh orang tua.

⁵Nathan Manning & Kathy Edwards, "Does Civic Education for Young People Increase Political Participation? A Systematic Review" dalam *Educational Review*, Vol. 66, No. 1 (2014), h. 22-45 .

⁶*Ibid.*

⁷Jacqueline Laughland-Booÿ, Zlatko Skrbiš & Zareh Ghazarian, "The Voting Strategies of Young People: a Conceptual framework" dalam *Australian Journal of Political Science*, Vol. 53, No. 2 (2018), h. 143-159.

⁸Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" dalam *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2018), h. 57-62.

Dalam hal ini posisi orang tua menjadi sumber preferensi politik dominan terutama pada tahap awal pembentukan preferensi politik pemilih pemula.⁹ Namun, hal tersebut nampaknya mengalami perubahan. Terdapat kecenderungan bahwa para orang tua dinilai mulai kehilangan posisinya sebagai sumber informasi utama dalam pembentukan preferensi politik pemilih pemula. Jika sebelumnya, posisi orang tua seolah menunjukkan bahwa tidak ada sumber referensi politik lain yang dapat memberikan informasi dan sosialisasi politik pada tahap awal pembentukan preferensi politik pemilih pemula. Hal tersebut nampaknya telah mengabaikan pentingnya aktivitas belajar mengajar di sekolah sebagai potensi sumber referensi yang baik bagi pemilih pemula. Padahal ternyata pemilih pemula dewasa ini memiliki sumber informasi penting lainnya. Salah satu sumber referensi politik yang sangat potensial untuk dapat membantu pemilih pemula dalam membentuk preferensi awal politiknya adalah pendidikan kewarganegaraan.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diterima di sekolah oleh para pemilih pemula terutama mereka yang berada pada tingkat sekolah menengah atas, cenderung hanya dilihat sebagai suatu mata pelajaran yang wajib diikuti seperti mata pelajaran yang lain. Upaya pemenuhan aspek formal seperti kehadiran serta kemampuan menjawab tugas yang diberikan oleh pengajar di sekolah lebih cenderung mewarnai keberadaan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sebagai implikasinya, pendidikan kewarganegaraan nampak tidak memberikan sumbangan yang cukup signifikan sebagai sebuah proses pendidikan politik pada upaya pembentukan preferensi politik awal para pemilih pemula.

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2020 terhadap segmen pemilih pemula, terdapat kecenderungan bahwa pendidikan kewarganegaraan nampaknya menjadi salah satu sumber referensi penting dalam pembentukan preferensi awal politik pemilih pemula. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa preferensi politik pemilih pemula tidak selalu merupakan refleksi dari kecenderungan perilaku politik orang tuanya, melainkan juga merupakan hasil dari pengembangan pemahaman mereka yang bersumber dari informasi yang mereka terima

⁹Mats Ekstrom & Johan Ostman, "Family Talk, Peer Talk, and Young People's Civic Orientation" dalam *European Journal of Communication*, Vol. 28, No. 3 (2013), h. 295.

melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mereka dapatkan di sekolah.

Tinjauan Pustaka

Studi-studi tentang pemilih pada dasarnya telah cukup banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Ketertarikan pada segmen masyarakat ini dalam tradisi demokrasi dewasa ini terutama terkait dengan bagaimana kecenderungan perilaku politik yang mereka tunjukkan.¹⁰ Selain itu, kecenderungan yang terlihat dari riset-riset terkait dengan segmen pemilih pemula adalah tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku politiknya.¹¹ Di samping kedua hal tersebut, terdapat juga penelitian yang mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh orang tua selain faktor lainnya terhadap kecenderungan perilaku politik pemilih muda di mana pemilih pemula menjadi bagian di dalamnya.¹² Pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut telah berkontribusi untuk memberikan suatu gambaran tentang beberapa aspek penting yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi dan perkembangan perilaku politik terkait dengan pemilu bagi para pemilih pemula.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk menampilkan faktor lain yakni pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pembentuk preferensi politik pemilih pemula. Selama ini pendidikan kewarganegaraan cenderung hanya dilihat sebagai sebuah bagian kurikulum pendidikan yang mencoba untuk memberikan informasi tentang prinsip-prinsip dasar kewargaan terutama terkait dengan hak dan kewajiban warga negara termasuk kepada para pemuda.¹³ Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dilihat sebagai sebuah upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sejak awal di kalangan pemuda¹⁴.

Meski tetap mencoba untuk mencermati faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku politik pemilih pemula, namun tulisan ini mencoba

¹⁰RR Emilia Yustiningrum & Wawan Ichwanuddin, *Op.Cit.*, h. 119.

¹¹Jakob Ohme, "When Digital Natives Enter the Electorate: Political social Media Use among First-Time Voters and its Effect on campaign Participation" dalam *Journal of Information Technology and Politics*, Vol. 16, No. 2 (2019), h. 121.

¹²Elisabeth Gidengil, Hanna Wass & Maria Valaste, "Political Socialization and Voting: The Parent-Child Link in Turnout" dalam *Political Research Quarterly*, Vol. 69, No. 2 (2016), h. 374.

¹³Özlem Becerik Yoldaş, *Op.Cit.*, h. 544.

¹⁴Fitri Silvia Sofyan & Dadang Sundawa, "Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Peningkatan Wawaasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa" dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24, No. 2 (2015), h. 189.

mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana faktor pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sebuah ruang pembentukan preferensi politik awal dari pemilih pemula. Dengan demikian, tulisan ini mencoba untuk lebih melihat pada titik mana pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya juga menjadi faktor pembentuk preferensi politik pemilih pemula terutama pemilih pemula di Kota Makassar.

Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara mendalam kepada 45 informan. Para informan merupakan pelajar pada sekolah menengah atas atau yang sederajat di Kota Makassar dan sekitarnya. Semua informan merupakan segmen pemilih pemula yang baru pertama kali akan memiliki hak pilih pada kegiatan Pilkada pada tahun 2020 di Kota Makassar. Asal sekolah dari setiap informan dipilih berdasarkan beberapa kategori yakni Sekolah Swasta, Sekolah Negeri, Sekolah Berdasarkan Identitas Agama, Sekolah yang menerapkan sistem asrama, dengan mencermati status sekolah unggulan dan non-unggulan. Kategorisasi ini dimaksudkan untuk mencoba menunjukkan kecenderungan pemilihan siswa-siswa berdasarkan latar belakang sekolah dari setiap informan. Seluruh informan yang dipilih, ditetapkan berdasarkan standar kriteria bahwa mereka terlibat aktif dalam organisasi di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menggali data lebih dalam karena mereka dianggap cukup memiliki pengalaman di organisasi sekolah sehingga mereka cukup dapat mengungkapkan pandangan dan mengekspresikan sikap dan pemikirannya terkait dengan kecenderungan preferensi politiknya.

Hasil dan Diskusi

Upaya untuk membangun partisipasi politik yang lebih baik menjadi salah satu isu penting dalam upaya mewujudkan sistem demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu setiap unsur dalam masyarakat diharapkan memiliki ruang dan mampu terlibat secara aktif dalam berbagai proses yang ada termasuk dalam proses pemilu, termasuk para pemilih pemula. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang baik dari setiap segmen masyarakat yang ingin terlibat terkait dengan substansi, dinamika dan efek dari setiap kondisi dalam ruang politik. Oleh

karena itu, setiap orang yang terlibat diharapkan telah memiliki pemahaman atau preferensi yang memadai dalam menopang keterlibatannya.¹⁵ Kenyataan bahwa preferensi menjadi dasar bagi perilaku politik yang ditunjukkan dalam ruang-ruang politik, maka preferensi tentu menjadi aspek penting terkait dengan segmen pemilih pemula yang dianggap masih minim dalam berinteraksi dengan dinamika politik.

Sebagai segmen yang cenderung dianggap belum memiliki referensi politik yang memadai dan bahkan dianggap kurang tertarik dengan politik, pemilih pemula seringkali dianggap kurang siap terutama dalam partisipasi pertamanya dalam kegiatan politik seperti pemilu seperti yang ada pada segmen pemilih dewasa.¹⁶ Hal ini terutama dikaitkan dengan anggapan masih minimnya sumber referensi politik yang dapat diakses oleh pemilih pemula dalam mempersiapkan diri menuju proses pemilu yang pertama kali akan mereka ikuti. Karena itu mereka dianggap perlu untuk mendapatkan proses pendidikan politik yang baik apalagi segmen memiliki jumlah yang biasanya cukup besar dalam suatu masyarakat.

Di Indonesia, pada tahun 2019 terdapat sekitar 5 juta pemilih pemula.¹⁷ Jumlah tersebut tentu merupakan jumlah yang signifikan. Di Kota Makassar sendiri, pada pemilihan walikota 2020, terdapat sekitar 42 ribu pemilih pemula¹⁸ yang berarti sekitar hampir 5% dari seluruh pemilih yang tercatat. Dengan demikian, pembentukan preferensi segmen ini melalui pendidikan kewarganegaraan dilihat sebagai salah satu aspek penting dalam upaya awal pembentukan preferensi politik sebagai sosialisasi kesadaran politik awal bagi sejumlah besar masyarakat yang disebut sebagai pemilih pemula.

Konsep sosialisasi politik ini merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam kaitan dengan proses pendidikan maupun pelatihan terkait kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, upaya pembentukan kesadaran politik awal akan dapat dilakukan sesuai dengan konteks dan tingkat pemahaman segmen yang dituju.

¹⁵Sergiu Gherghina & Brigitte Geissel, "Linking Democratic Preferences and Political Participation: Evidence from Germany" dalam *Political Studies*, Vol. 65, No. 1 (2017), h. 25.

¹⁶Özlem Becerik Yoldaş, *Op.Cit.*, h. 545.

¹⁷Dwi Andayani, "Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019" dalam <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019> diakses 24 Desember 2020.

¹⁸Ardiansyah, "Pemilih Pemula Pilwalkot Makassar capai 42.460 Orang" dalam <http://politik.djournalist.com/2020/11/16/pemilih-pemula-pilwalkot-makassar-capai-42-460-orang/> diakses 24 Desember 2020.

Pada dasarnya, materi-materi yang ada pada pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu struktur informasi yang dapat membentuk pandangan pemilih pemula terhadap dunia politik di sekitarnya. Secara mendasar pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan yang menempatkan adanya interaksi antar warga negara baik sebagai individu maupun masyarakat serta adanya standar-standar perilaku tertentu berdasarkan norma dan nilai yang berlaku. Melalui hal tersebut maka, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan penting yang dapat membantu pembentukan preferensi pemilih pemula pada fase-fase awal pembentukan kesadaran politiknya. Oleh karena itu, pemilih pemula yang merupakan segmen pemuda dan sebagian besar adalah siswa level Sekolah Menengah Atas yang menerima pendidikan kewarganegaraan di sekolahnya, pada dasarnya sejak awal memiliki sumber informasi awal yang penting terkait dengan pembentukan preferensi politiknya.¹⁹

Berdasarkan preferensi itulah para pemula nantinya akan menunjukkan perilaku politiknya, termasuk pada saat memilih dalam pemilu. Hal tersebut menjadi suatu kecenderungan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan terhadap segmen pemilih pemula di Kota Makassar. Hal ini nampaknya menjadi pembeda atas pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan juga suatu pengetahuan yang berimplikasi pada perilaku tertentu. Hal tersebut yang diyakini oleh para pemilih pemula sebagai jalan bagi proses pembentukan bentuk preferensi politiknya. Hal ini dikonfirmasi oleh pemilih pemula yang menyatakan bahwa “*Kenal politik dari lingkungan sekolah karena di sekolah terdapat pelajaran PKN yang di mana guru dari mata pelajaran tersebut terkadang menjelaskan mengenai politik yang berhubungan dengan materi pembelajaran seperti mengenai pemilu, dll*”.²⁰

Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan untuk meningkatkan pengetahuan atas politik terkait dengan interaksi kepentingan serta hak dan kewajiban warga negara bagi pemilih pemula. Dengan fokus utama pendidikan kewarganegaraan menekankan pada bahwa kesadaran sebagai warga negara dan implikasinya dalam kehidupan bersama maka pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran politik awal pada level pemuda. Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan menjadi salah

¹⁹Ahm, Pemilih pemula, *wawancara*, 23 Juli 2020.

²⁰Nur, Pemilih Pemula, *wawancara*, 23 Juli 2020.

satu ruang persentuhan awal pemilih pemula dengan informasi terkait politik pada konteks dasar.²¹ Hal ini dimungkinkan karena salah satu aspek penting dari pendidikan kewarganegaraan adalah upayanya untuk menghadirkan suatu pola perilaku sosial mendasar bagi warga negara. Pola perilaku yang dihasilkan termasuk kemampuan empati, kooperatif, loyalitas, solidaritas dan toleransi.²² Semuanya merupakan sikap dasar yang penting bagi setiap warga negara dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik.

Hal tersebut paling tidak telah membuka kesadaran para pemilih pemula tentang beberapa aspek dari sistem politik dalam konteks kehidupan mereka. Hal ini kemudian menjadi jalan dalam menjembatani defisit atas pengetahuan politik pemilih pemula serta implikasinya dalam upaya menunjukkan partisipasinya secara baik dalam sistem yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mengaitkan aspek literasi dan partisipasi politik secara lebih baik. Asumsi ini sangat terkait dengan kenyataan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pengetahuan pada segmen pemilih pemula dapat mendorong minat yang besar dan kapasitas awal yang memadai untuk berpartisipasi, sehingga pemilih pemula dapat berpartisipasi secara lebih baik dalam menentukan pilihannya.

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan konfirmasi empirik bahwa posisi pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar dari sekedar sebagai suatu bidang studi yang akan dihafalkan atau hanya dilihat sebagai gambaran contoh-contoh perilaku tertentu. Namun pendidikan kewarganegaraan telah menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepada para pemilih pemula dalam membentuk kesadaran politik awal yang pada akhirnya membentuk preferensi politik para pemilih pemula. Hal ini dinyatakan oleh pemilih pemula yang menyatakan bahwa *“di sekolah terdapat pelajaran PKN yang beberapa materinya membahas mengenai politik sehingga dengan mempelajarinya atau mendengar penjelasan dari guru mata pelajaran tersebut saya menjadi lebih tahu tentang politik di Indonesia.”*²³

Kenyataan tersebut menjadikan pendidikan kewarganegaraan memiliki misi lebih besar dari hanya sekedar sumber informasi tentang dinamika kehidupan bernegara

²¹Özlem Becerik Yoldaş, *Loc.Cit.*

²²*Ibid*, h. 547.

²³And, Pemilih Pemula, *wawancara*, 16 Agustus 2020.

bagi pemilih pemula, kemudian berubah menjadi upaya pendidikan politik yang lebih komprehensif sejak awal bagi para generasi muda. Tentu saja, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pendidikan kewarganegaraan bukanlah satu-satunya sumber referensi, karena peran orang tua termasuk perkembangan media sosial menjadi sumber-sumber informasi pembentukan preferensi politik awal pemilih pemula.²⁴ Pendidikan kewarganegaraan menjadi ruang lain yang membuka kontak pemilih pemula dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan warga negara.

Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan memberikan kesadaran awal terkait dengan bagaimana posisi mereka dalam ruang politik sehingga memiliki dasar berpikir tentang bagaimana memosisikan diri dalam ruang tersebut. Pernyataan dari pemilih pemula bahwa "*PKN memberikan contoh-contoh perilaku yang harus dilakukan sebagai warga negara secara tepat agar dapat dianggap sebagai warga negara yang baik di tengah masyarakat agar tidak menimbulkan masalah.*"²⁵ Melalui pendidikan kewarganegaraan pemilih pemula memiliki pemahaman dasar yang akan bermanfaat dalam upaya mereka mengembangkan pengamatannya pada realitas politik di sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada aspek pemahaman, namun bagi pemilih pemula di Kota Makassar, telah mengarah kepada upaya untuk memastikan kesadaran politik pemilih pemula tentang bagaimana mereka sebaiknya berperilaku secara tepat. Hal ini menjadi tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan dalam mendorong peletakan pemahaman yang mengarah kepada kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam ruang politik.

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran sebagai penyedia informasi dalam membuat penilaian dengan lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu aspek yang membantu pemilih pemula dalam memasuki ruang politik dan berkontribusi secara lebih baik. Dengan posisi yang sangat penting baik dalam konteks kuantitas maupun sebagai calon penerus bangsa, kemampuan pemilih pemula untuk mengidentifikasi dirinya sejak awal dalam konteks politik seperti yang didapatkan melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi faktor yang akan berpengaruh pada keberlanjutan sistem demokrasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan preferensi politik sebagai bentuk awal

²⁴Jakob Ohme, *Op.Cit.*, h. 121.

²⁵Fau, Pemilih Pemula, *wawancara*, 16 Agustus 2020.

kesadaran politik pemilih pemula pada dasarnya terbentuk dari berbagai faktor yang akan saling memperkuat bukan hanya orang tua, media, sosial, pergaulan antar teman sebaya, namun juga dengan keberadaan pendidikan kewarganegaraan yang diterima dari kegiatan sekolah²⁶. Jika hal ini terbentuk dengan baik, maka pada dasarnya generasi muda dalam hal ini para pemilih pemula akan menjadi unsur penting dalam mempertahankan sistem demokrasi yang senantiasa membutuhkan peran aktif masyarakat secara substansial dalam memastikan keberlangsungan sistem ini dalam menuju terbentuknya kebaikan bersama yang menjadi dasar eksistensinya.

Upaya untuk membangun partisipasi politik yang lebih baik menjadi salah satu isu penting dalam upaya mewujudkan sistem demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu setiap unsur dalam masyarakat diharapkan memiliki ruang dan mampu terlibat secara aktif dalam berbagai proses yang ada termasuk dalam proses pemilu, termasuk para pemilih pemula. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang baik dari setiap segmen masyarakat yang ingin terlibat terkait dengan substansi, dinamika dan efek dari setiap kondisi dalam ruang politik. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat diharapkan telah memiliki pemahaman atau preferensi yang memadai dalam menopang keterlibatannya.²⁷ Kenyataan bahwa preferensi menjadi dasar bagi perilaku politik yang ditunjukkan dalam ruang-ruang politik, maka preferensi tentu menjadi aspek penting terkait dengan segmen pemilih pemula yang dianggap masih minim dalam berinteraksi dengan dinamika politik.

Sebagai segmen yang cenderung dianggap belum memiliki referensi politik yang memadai dan bahkan dianggap kurang tertarik dengan politik, pemilih pemula seringkali dianggap kurang siap terutama dalam partisipasi pertamanya dalam kegiatan politik seperti pemilu seperti yang ada pada segmen pemilih dewasa.²⁸ Hal ini terutama dikaitkan dengan anggapan masih minimnya sumber referensi politik yang dapat diakses oleh pemilih pemula dalam mempersiapkan diri menuju proses pemilu yang pertama kali akan mereka ikuti. Karena itu mereka dianggap perlu untuk mendapatkan proses pendidikan politik yang baik apalagi segmen memiliki jumlah yang biasanya cukup besar dalam suatu masyarakat.

²⁶Sukri, A. Yunus & D. Ekawaty, "The Forming of First-time Voters' Political Preference in Indonesia" dalam *Youth Voice Journal* (2021), h. 1-18.

²⁷Sergiu Gherghina & Brigitte Geissel, *Loc.Cit.*

²⁸Özlem Becerik Yoldaş, *Loc.Cit.*

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kata kunci bagi bekerjanya sistem demokrasi termasuk di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam berbagai ruang demokrasi termasuk pemilu. sebagai ruang untuk memilih para pemimpin, maka pemilu tentu membutuhkan kemampuan dari setiap segmen masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga mampu berpartisipasi secara rasional. Hal ini termasuk pada segmen pemilih pemula.

Sebagai segmen masyarakat yang baru pertama kali memiliki hak dan menggunakannya dalam pemilu, pemilih pemula seringkali dianggap belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk berpartisipasi dengan baik. Jikapun mereka berpartisipasi maka sangat dikaitkan dengan kecenderungan perilaku politik orang tuanya, di mana orang tua dianggap sebagai sumber pembentuk utama pada awal pembentukan preferensi politik mereka. Namun hasil penelitian dari segmen pemula di Kota Makassar menunjukkan kecenderungan telah adanya preferensi yang cukup dari pemilih pemula terhadap politik. Salah satu sumber utama pembentukan preferensi tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemilih pemula mendapatkan sumber informasi terkait bagaimana individu sebagai bagian dari masyarakat dapat menemukan pola perilaku yang diharapkan dalam dinamika kehidupan politik. Hal tersebut menjadi awal kesadaran yang membentuk preferensi politiknya. Bagi mereka, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi suatu ruang pendidikan politik yang memungkinkan mereka mengenal aspek-aspek hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka interkasi antar warga negara. Hal ini menjadi awal preferensi mereka dan menjadi dasar pengembangan pengetahuan mereka. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan telah menumbuhkan kesadaran politik awal yang pada akhirnya memberi referensi awal pada pilihan perilaku politik mereka dalam sistem demokrasi yang ada. Pendidikan kewarganegaraan tampaknya telah memberikan efek positif yang baik pada level pemilih pemula dalam interaksi awalnya dengan pemahaman politik.

Hal tersebut pada akhirnya menunjukkan besarnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan preferensi politik pemilih pemula pada awal pembentukan preferensi politiknya. Pada pemahaman ini, pendidikan kewarganegaraan

menjadi salah satu peluang besar bagi upaya mengembangkan kepedulian yang mengarah kepada partisipasi aktif pemilih pemula secara tepat sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Biegelbauer, Peter & Janus Hansen. "Democratic Theory and Citizen Participation: Democracy Models in the Evaluation of Public Participation in Science and Technology" dalam *Science and Public Policy*, Vol. 38, No. 8 (2011), h. 589-597.
- Ekstrom, Mats & Johan Ostman. "Family Talk, Peer Talk, and Young People's Civic Orientation" dalam *European Journal of Communication*, Vol. 28, No. 3 (2013), h. 294-308.
- Gherghina, Sergiu & Brigitte Geissel. "Linking Democratic Preferences and Political Participation: Evidence from Germany" dalam *Political Studies*, Vol. 65, No. 1 (2017), h. 24-42.
- Gidengil, Elisabeth, Hanna Wass & Maria Valaste. "Political Socialization and Voting: The Parent-Child Link in Turnout" dalam *Political Research Quarterly*, Vol. 69, No. 1 (2016), h. 373-383.
- Kristenseng, Niels Nørgaard & Trond Solhaug. "Students as First-time Voters: The Role of Voter Advice Applications in Self-reflection on Party Choice and Political Identity" dalam *Journal of Social Science Education*, Vol. 15, No. 3 (2016), h. 32-42.
- Laughland-Booÿ, Jacqueline, Zlatko Skrbis̃ & Zareh Ghazarian. "The Voting Strategies of Young People: a Conceptual framework" dalam *Australian Journal of Political Science*, Vol. 53, No. 2 (2018), h. 143-159.
- Manning, Nathan & Kathy Edwards. "Does Civic Education for Young People Increase Political Participation? A Sistematic Review" dalam *Educational Review*, Vol. 66, No. 1 (2014), h. 22-45 .
- Ohme, Jakob. "When Digital Natives Enter the Electorate: Political social Media Use among First-Time Voters and its Effect on Campaign Participation" dalam *Journal of Information Technology and Politics*, Vol. 16, No. 2 (2019), h. 119-136.
- Sofyan, Fitri Silvia & Dadang Sundawa. "Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Peningkatan Wawaasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa" dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24, No. 2 (2015), h. 185.

Sukri, A. Yunus & D. Ekawaty. "The Forming of First-time Voters' Political Preference in Indonesia" dalam *Youth Voice Journal* (2021), h. 1-18.

Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" dalam *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2018), h. 57-62.

Yoldaş, Özlem Becerik. "Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People" dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 174 (2015), h. 544 – 549.

Yustiningrum, RR Emilia & Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014" dalam *Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2015), h. 117-1335.

Internet

Andayani, Dwi. "Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019" dalam <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019> diakses 24 Desember 2020.

Ardiansyah. "Pemilih Pemula Pilwalkot Makassar capai 42.460 Orang" dalam <http://politik.djournalist.com/2020/11/16/pemilih-pemula-pilwalkot-makassar-capai-42-460-orang/> diakses 24 Desember 2020.

Wawancara

Ahm, Pemilih Pemula, *wawancara*, 23 Juli 2020.

And, Pemilih Pemula, *wawancara*, 16 Agustus 2020.

Fau, Pemilih Pemula, *wawancara*, 16 Agustus 2020.

Nur, Pemilih Pemula, *wawancara*, 23 Juli 2020.